

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Implementasi Kebijakan**

##### **2.1.1 Pengertian Implementasi**

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang dibuat dengan baik, namun tidak memiliki pengaruh dalam kehidupan negara karena tidak dilaksanakan dengan baik. Istilah (*to implement*) mengimplementasikan itu berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Menginterpretasikan dan menetapkan suatu kebijakan sebelum diimplementasikan ialah langkah awal yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan suatu capaian seperti program yang telah dipilah sedemikian rupa sebelum adanya penetapan. Melakukan imterpretasi tersebut berkenaan dengan mendefinisikan atau mengatur metode-metode untuk melaksanakan program. program yang memberi peluang kepada pemerintah yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah memiliki banyak bentuk dan macam, salah satunya terkait kebijakan mengenai kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pembuatan ataupun pengimplementasian perlu dilandasi oleh kebijakan yang pro atau sesuai bukan hanya untuk satu daerah namun untuk daerah-daerah lainnya yang sesuai sehingga tidak terjadi kesenjangan akan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi menurut *Merriam Webster*, Suatu tindakan atau contoh penerapan sesuatu. Tindakan ini meliputi proses membuat sesuatu menjadi aktif atau efektif. Implementasi adalah proses yang mengubah strategi dan rencana menjadi tindakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis. Implementasi adalah tindakan yang harus mengikuti setiap pemikiran awal agar tujuannya benar-benar tercapai. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap *fix*. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris (*Implement*) yang berarti melaksanakan.<sup>1</sup>

### **2.1.2 Konsep Implementasi Kebijakan**

Pada dasarnya pengertian implementasi kebijakan bukan hanya terkait dengan mekanisme penjabaran keputusan politik kedalam prosedur rutin birokrasi, melainkan pada masalah aspek perwujudan kebijakan serta dalam kondisi bagaimana kebijakan tersebut dibuat, siapa yang membuat, akibat dari kebijakan dan bagaimana kebijakan tersebut setelah di implementasikan.

Tahap implementasi kebijakan akan memunculkan konsekuensi yang merupakan bias dari konsekuensi tersebut dan yang paling dirasakan oleh masyarakat yaitu konsekuensi negatif dan positif. Implementasi kebijakan merupakan proses lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan. Pada tahap formulasi diterapkan strategi dan tujuan kebijakan, sedangkan tindakan untuk mencapai tujuan diselenggarakan pada tahap implementasi kebijakan. Implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan yang mengikuti

---

<sup>1</sup> Hanifah Harsono, "Implementasi Kebijakan Dan Politik," *Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya* (2002): 21-25.

suatu keputusan yang telah diterbitkan. Satu keputusan slalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran tertentu.

Menurut *Edward III* menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi atau akibat dari kebijakan pada kelompok sasaran yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat untuk mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik, bahkan kebijakan yang cemerlang diimplementasikan dengan kurang baik, cenderung akan mengalami kegagalan untuk mencapai tujuan.

Kebijakan yang diimplementasikan yang mengandung resiko gagal Menurut *Hogwood* dan *gunn*, untuk itu kegagalan kebijakan dapat dibagi kedalam pengertian yaitu: (*Policy Failure*) dalam dua katagori, yaitu tidak terimplementasikan (*non implementation*) dan implementasi yang tidak berhasil (*unsuccessful implemation*). Kegagalan implementasi kebijakan, kebanyakan disebabkan oleh:

- a) Pelaksanaan yang kurang baik (*bad execution*)
- b) Kebijakannya sendiri yang memang jelek (*bad policy*)
- c) Kebijakan yang bernasib (*bad luck*).

Terkait dengan permasalahan kegagalan inilah, maka *Edward III*, melihat bahwa struktur birokrasi mempunyai dampak atas implementasi kebijakan

dalam arti bahwa penerapan kebijakan tidak akan berhasil jika terdapat kekurangan dalam struktur birokrasi tersebut.<sup>2</sup>

### 2.1.3 Teori- Teori Implementasi

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variable atau faktor, dan masing-masing variable tersebut yang saling berhubungan satu sama lain.

#### A. Teori Implementasi *George C. Edward III*

Model Implementasi kebijakan bersepektif *top down* dikembangkan oleh *George C. Edward III* menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implemation*. Dalam pendekatan yang di teoremakan oleh *Edward III*, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, (4) struktur birokrasi.

##### 1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Implementasi yang efektif baru akan tercapai apabila para pembuat keputusan (*decision maker*) sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan baru dapat berjalan manakala komunikasi berlangsung dengan baik. Artinya, suatu keputusan kebijakan atau peraturan implementasi harus ditransmisikan kepada

---

<sup>2</sup> Alexander Phuk Tjilen, "Konsep, Teori Dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik," *Bandung: Nusamedia* (2019): 24-26.

implementer yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsistensi.

Menurut *Edward III*, komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi untuk mengetahui sejauh mana komunikasi itu dapat berfungsi secara tepat, akurat, dan konsisten, ada tiga indikator yang dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

- 1) Dimensi transisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target group dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga di antara mereka mengetahui apa yang dimaksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.
- 3) Dimensi konsisten (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target group dan pihak-pihak yang berkepentingan.

## 2. Sumberdaya

Sumber Daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga sumber daya dapat berjalan dengan baik yaitu:

- a) Staf atau lebih tepat dikenal *Street-level bureaucrats*. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak mencukupi/memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya.
- b) Informasi, dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk, yaitu :
  - 1) Informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan di saat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan.
  - 2) Informasi mengenai data kepatuhan daripada pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- c) Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melakukan kebijakan yang ditetapkan secara politik.

d) Fasilitas, implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana), maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

### 3. Disposisi,

Disposisi jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang dilakukan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya tidak terjadi bias. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap implementator. Jika implementer setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan membuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan; kesadaran pelaksanaan, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program ke arah penerimaan atau penolakan dan intens dari respon tersebut. Cara pelaksanaan mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada di dalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari

implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberi intensif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan.

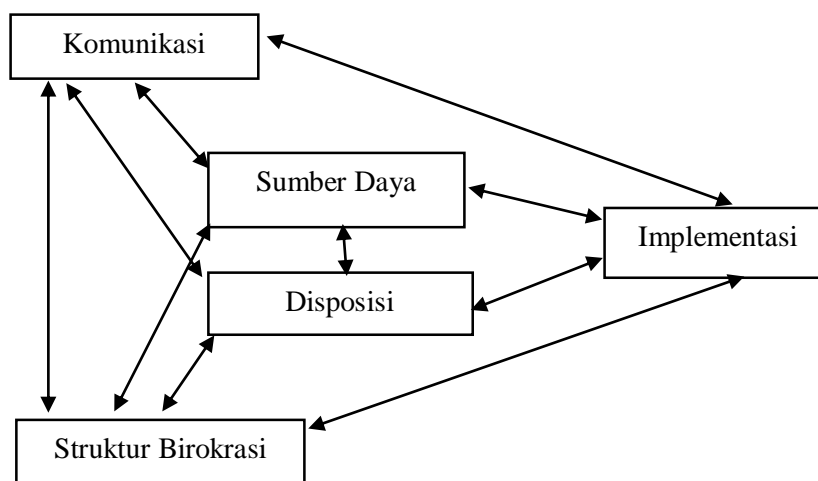
#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi Menurut *Edward III*, implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena adanya ketidak efisien struktur birokrasi (*deficiencies in bureaucratic structure*). Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan dengan organisasi luar dan sebagainya. Oleh karena itu, struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi (*fragmentation*) dan standar prosedur operasi (*standar operating procedure*) yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.



Model dari *George C Edward III* ini dapat digambarkan sebagai berikut<sup>3</sup>

**Bagan 2.1 Model Implementasi *Edward III***



#### B. Teori Implementasi *Merilee S Grindle*

Menurut *Merilee S. Grindle* (dalam Subarsono) dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Procces*. Menurut *Grindle* ada 2 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu :

1. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh *Grindle*, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 hal, yakni:

---

<sup>3</sup> Ibid 28-31.

- a) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
  - b) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu, Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok, dan Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.
2. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut *Grindle*, sangat ditentukan oleh tingkat penerapan (*implementability*) kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas:

Isi Kebijakan (*Content of Policy*) Mencakup:

- a) Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi (*Interest affected*)

Berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

- b) Tipe Manfaat (*Type of benefits*)

Menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

c) Derajat Perubahan yang ingin dicapai (*Extent of change envision*)

Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas.

d) Letak Pengambilan Keputusan (*Site of decision making*)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Apakah letak sebuah program sudah tepat.

e) Pelaksana Program (*Program implementer*)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten demi keberhasilan suatu kebijakan. Ini sudah harus terpapar atau terdata dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci.

f) Sumberdaya yang digunakan (*Resources committed*)

Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*) Mencakup:

- a) Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat (*Power, interest, and strategy of actor involved*)

Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan.

- b) Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa (*Institution and regime characteristic*)

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

- c) Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana (*Compliance and responsiveness*)

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat

sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui pada apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan.

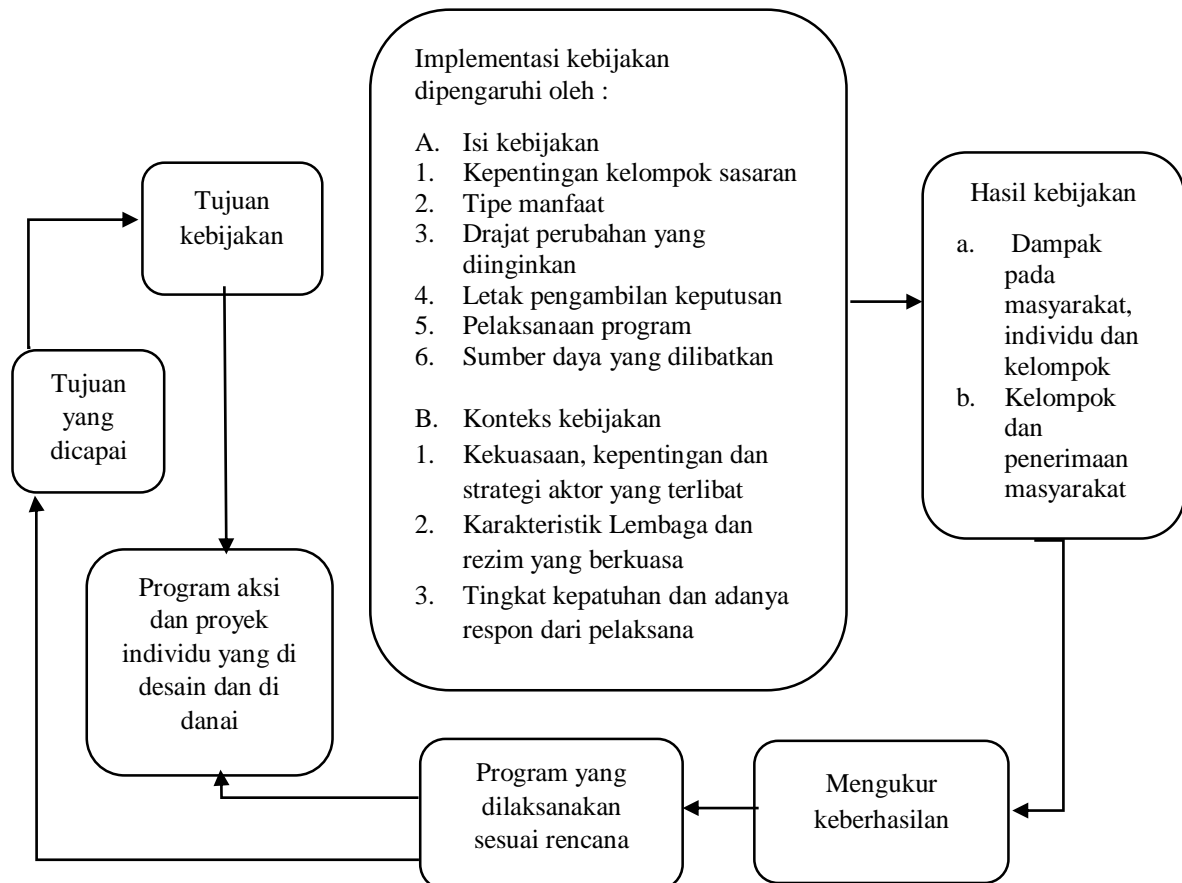
*Grindle* juga mengemukakan bahwa pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari masing-masing:

- 1) Dalam proses dapat dilihat pelaksanaan kebijakan apakah sesuai yang telah ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- 2) Tujuan kebijakan yang dicapai. Dimensi ini dapat diukur dengan melihat dua faktor, yakni
  - a) Dampak atau efek terhadap masyarakat secara individu dan kelompok
  - b) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran atas perubahan tersebut.

Sebagaimana model implementasi yang dipaparkan oleh *grindle*, memiliki kelebihan yaitu kemampuan mengidentifikasi dan menjelaskan bukan saja karakteristik birokrasi sebagai pelaksana, tetapi juga kekuasaan dan kelompok-kelompok kepentingan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan tersebut kelemahan dari model ini tidak adanya benang merah yang menjadi penjelas mana variabel yang berpengaruh secara langsung dan mana variabel yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap hasil

kebijakan. Untuk lebih jelasnya model sebagaimana diuraikan di atas, dapat kita lihat pada gambar berikut.<sup>4</sup>

**Bagan 2.2 Model Implementasi Merilee S. Grindle**



## 2.2 Kebijakan Publik

Menurut *Leo Agustino* pengertian kebijakan publik adalah sebagai suatu hubungan yang terjadi di antara unit pemerintah dengan lingkungannya.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> A G Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, ( Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012) hal 23-26.

<sup>5</sup> Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: alfabeta 2008), hal 138.

Adapun Menurut *James E Anderson* kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

*James E Anderson* mengemukakan elemen yang terkandung dalam kebijakan publik yang antara lain mencakup:

- 1) Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah.
- 2) Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah.
- 3) Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan lakukan atau menyatakan akan lakukan;
- 4) Bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk melakukan sesuatu; dan
- 5) Kebijakan pemerintah dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundangan yang bersifat memaksa (otoritatif).<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014) hal 4.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan serangkaian program pemerintah yang dilakukan atau tidak dilakukan untuk memecahkan masalah atau hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan tertentu.

## **2.3 Program Kartu Indonesia Pintar**

### **2.3.1 Pengertian Program kartu Indonesia pintar**

Kartu Indonesia pintar (KIP) merupakan bentuk pelaksanaan program indonesia pintar atau disingkat dengan (PIP) yang menjadi program unggulan presiden Joko Widodo. Program Indonesia Pintar, yang lalu disebut PIP adalah kartu yang di berikan untuk mahasiswa yang berasal dari keluarga yang mempunyai Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penanda/ identitas untuk mendapat manfaat PIP.

Program Indonesia Pintar dilaksanakan oleh dinas pendidikan provinsi, direktorat jendreal terkait, dinas pendidikan kabupaten/ kota, dan satuan pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD) menyiapkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) berdasarkan dari Basis Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pemberian bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar maupun bantuan pendidikan lainnya guna mendukung program wajib belajar bertujuan untuk meringankan beban biaya yang terlalu berat berat bagi orang



tua yang berasal dari status ekonomi bawah. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi mahasiswa untuk berkuliah.<sup>7</sup>

### **2.3.2 Dasar Hukum Program Indonesia Pintar (PIP)**

Berdasarkan permendikbud Nomor 10 tahun 2020 tentang program kartu Indonesia pintar dalam pasal 3 (PIP) dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip yaitu:

- a) Efisien, yaitu menggunakan dana dan yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat, cepat, dan dapat dipertanggung jawabkan.
- b) Efektif, yaitu sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- c) Transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PIP.
- d) Akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan.
- e) Kepatutan, yaitu penjabaran program atau kegiatan yang sejalan dengan peioritas nasional.
- f) Manfaat, yaitu pelaksanaan program atau kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Sartika, *Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Di Desa Rompegading Kecamatan Cencara Maros Kabupaten Maros*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018) hal 1-3.

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 tahun 2020 Pasal 3, Tentang Program Indonesia Pintar.

## 2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran digunakan untuk menjelaskan pola antar teori dan objek dalam penelitian. Pemikiran dari adanya Implementasi kebijakan kartu Indonesia pintar (KIP Kuliah) ini bertujuan untuk memberi bantuan kepada masyarakat yang berasal dari keluarga miskin atau kurang mampu agar bisa membiayai pendidikan. Untuk mengukur implementasi kebijakan kartu Indonesia pintar (KIP Kuliah) di universitas baturaja peneliti menggunakan teori *Merilee S Grindle*. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat apakah penerapan program kartu Indonesia pintar (KIP KULIAH) di Universitas Baturaja sudah sesuai dengan prinsip PIP yang tertuang dalam pasal 3 Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2020 tentang kartu indonesia pintar. Proses implementasi kebijakan tersebut pada akhirnya diharapkan untuk mencapai tujuan Implementasi kebijakan penerapan (KIP KULIAH) di universitas baturaja. penjelasan Kerangka Pemikiran lebih lanjut dan ringkas akan peneliti gambarkan dalam bagan berikut:

**Gambar 2.3**

**Bagan Kerangka Pikir**

